

Manajemen Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta

Tri Lestari Widayati^{1*}, Wiwik Wijayanti²

¹²Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: tri737fip.2022@student.uny.ac.id

ARTICLE INFO

Section:

Research Articles

Article history:

Received: January 21, 2026

Revised: April 14, 2026

Accepted: June 02, 2026

Published: August 01, 2026

Kata kunci:

Pendidikan Inklusi;
Pendampingan Siswa; Kesiapan
Guru; Sarana Prasarana;
Kolaborasi Sekolah

Keywords:

*Inclusive Education; Student
Assistance; Teacher Readiness;
Facilities and Infrastructure;
School Collaboration.*

How to Cite (APA Style 7):

Widayati, T S., & Wijayanti, W.
(2026). *Manajemen Pendidikan
Inklusi di Kota Yogyakarta*.
*Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah
Guru*, 11(1), 109-116
<https://doi.org/10.51169/ideguru.v11i1.2336>



This is an open access article under
the [CCBY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) international license.
Copyright © 2026 Tri Lestari
Widayati, Wiwik Wijayanti

ABSTRAK

Pendidikan inklusi merupakan upaya untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Meskipun telah didukung oleh berbagai kebijakan dan regulasi, implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan guru pendamping khusus, kesiapan guru dalam pembelajaran inklusif, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendampingan siswa, kesiapan guru, penyiapan materi pembelajaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif di dua sekolah dasar di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas, Guru Pendamping Khusus (GPK), tenaga kependidikan, orang tua anak berkebutuhan khusus, dan orang tua siswa reguler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan siswa dilakukan melalui pembelajaran bersama di kelas reguler oleh guru kelas dan GPK serta layanan pull-out di ruang inklusi. Penyiapan materi pembelajaran dilakukan melalui penyusunan modul ajar berdiferensiasi sesuai Kurikulum Merdeka. Keberhasilan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh dukungan Unit Layanan Disabilitas, ketersediaan GPK, kolaborasi warga sekolah, kemitraan eksternal, serta kecukupan sarana dan prasarana.

ABSTRACT

Inclusive education is an effort to provide equal learning opportunities for all students, including children with special needs, in regular schools. Although it has been supported by various policies and regulations, the implementation of inclusive education in elementary schools still faces several challenges, such as the limited number of

special assistant teachers, teachers' readiness in implementing inclusive learning, and limited facilities and infrastructure. This study aims to examine student assistance, teacher readiness, preparation of learning materials, and the availability of facilities and infrastructure in supporting the success of inclusive education in two elementary schools in Yogyakarta City. This research uses a qualitative approach through interviews with school principals, classroom teachers, Special Assistant Teachers (GPK), educational staff, parents of children with special needs, and parents of regular students. The results show that student assistance is carried out through joint learning in regular classrooms by classroom teachers and GPK, as well as through pull-out services in the inclusion room. The preparation of learning materials is conducted through the development of differentiated teaching modules based on the Merdeka Curriculum. The success of inclusive education is influenced by support from the Disability Service Unit, the availability of GPK, collaboration among school members, external partnerships, and adequate facilities and infrastructure.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan merupakan hak dasar setiap warga Negara dan menjadi sarana utama untuk meningkatkan kualitas serta martabat kehidupan manusia. Pendidikan pada hakikatnya tidak membedakan individu berdasarkan ras, suku, etnis, agama, kemampuan, maupun karakteristik pribadi lainnya, sehingga penyelenggaraannya harus bersifat terbuka dan menyeluruh. Oleh sebab itu negara harus dapat menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Indonesia dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi setiap individu penyandang disabilitas. Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional serta Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang terdiri ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) yang menjelaskan kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Salah satu pendekatan strategi untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan non diskriminatif adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar bersama dalam satuan pendidikan reguler. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memperluas akses pendidikan, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap saling menghormati. Pada tataran internasional, pendidikan inklusif memperoleh penguatan melalui *World Summit on Education for All* (1990) dan *Salamanca Statement* (1994). Di Indonesia kebijakan ini secara yuridis diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

Permendiknas No 70 Tahun 2009 menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, hambatan, maupun potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan bersama peserta didik lainnya. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan hak setiap peserta didik serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip nondiskriminasi. Namun demikian, dalam praktik

pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam melayani peserta didik dengan hambatan intelektual, seperti tunagrahita, yang membutuhkan strategi pembelajaran, pendampingan, dan penyesuaian kurikulum yang lebih spesifik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 pasal 129 ayat 3 menjelaskan bahwa siswa berkelainan terdiri atas siswa diantaranya tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunalaras, kesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban narkoba terlarang dan zat adiktif lainnya, serta memiliki kelainan lainnya (Muttaqien, 2023)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Sejak ditetapkan sebagai daerah percontohan pendidikan inklusif oleh UNESCO pada tahun 2013, pemerintah daerah terus mendorong penyelenggaraan pendidikan yang ramah bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Berbagai kebijakan telah diterbitkan untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif, di antaranya Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif serta Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Secara umum, sekolah inklusi di DIY telah berkembang cukup pesat, terutama pada jenjang sekolah dasar. Banyak sekolah reguler telah ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan menerima peserta didik dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Dalam pelaksanaannya, sekolah inklusi didukung oleh keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK), Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta berbagai program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

Meskipun telah didukung oleh berbagai regulasi dan kebijakan, implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar masih menghadapi kendala yang cukup kompleks. Keterbatasan jumlah dan kompetensi guru pendamping khusus, kesiapan guru kelas dalam melaksanakan pembelajaran inklusif, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya pemahaman sebagian warga sekolah terhadap konsep pendidikan inklusif masih menjadi hambatan utama. Selain itu masih terdapat persepsi bahwa kehadiran ABK di kelas reguler dapat mengganggu proses pembelajaran, yang berpotensi memunculkan sikap diskriminatif dan menghambat terciptanya iklim sekolah yang inklusif.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan erat dengan aspek manajemen pendidikan. Dapa dan Tuerah

(2021) menemukan bahwa manajemen sekolah inklusif di Kota Yogyakarta belum berjalan optimal, terutama pada aspek perencanaan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya. (Nurwan, 2019) juga mengungkapkan bahwa persiapan guru, penyesuaian kurikulum, dan pemahaman terhadap karakteristik ABK masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. (Bahri, 2022) juga menegaskan bahwa persepsi guru dan masyarakat turut memengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada kualitas manajemen pendidikan yang diterapkan di sekolah.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan inklusif di sekolah belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program. Padahal, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kualitas manajemen pendidikan inklusif yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu. Penelitian ini dilakukan di dua sekolah dasar di Kota Yogyakarta, yaitu SD Negeri Giwangan dan SD Negeri Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji spek-aspek utama manajemen pendidikan inklusif yang berhubungan langsung dengan layanan pembelajaran dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar, yang mencakup diantaranya pendampingan siswa, penyiapan materi pembelajaran, kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran inklusif, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai praktik dan tantangan manajemen pendidikan inklusif di sekolah dasar, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang manajemen pendidikan inklusif serta menjadi bahan rekomendasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik khususnya di sekolah negeri Kota Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian fenomenologi. Penelitian ini dipilih untuk memahami secara mendalam makna pengalaman para pelaku pendidikan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasarkan kondisi nyata dilapangan. Studi ini berfokus pada lima aspek utama meliputi pendampingan siswa pendidikan

inklusi, penyiapan materi belajar pendidikan inklusi, kesiapan guru pada pendidikan inklusi, ketersediaan sarana dan prasarana pada pendidikan inklusi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusi. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Giwangan dan SD Negeri Karanganyar Kota Yogyakarta, yang telah menerapkan pendidikan inklusif dengan waktu yang lama dan mempunyai siswa dengan karakteristik yang berbeda atau beragam namun berada dalam satu wilayah administratif yang sama. Penelitian dilaksanakan pada bulan agustus sampai dengan bulan oktober tahun 2025. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, dengan informan meliputi kepala sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), tenaga kependidikan, serta orang tua peserta didik yang berkebutuhan khusus serta orang tua peserta didik reguler. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai bentuk triangulasi metode. Observasi difokuskan pada pelaksanaan pendidikan inklusif, kesiapan guru, pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka untuk memperoleh data yang mendalam, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui uji *kredibilitas*, *transferabilitas*, *dependabilitas*, dan *komfirmabilitas*. Proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai manajemen pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian diketahui bahwa pendampingan siswa pendidikan inklusi di kedua satuan pendidikan sekolah dasar yakni SDN Giwangan dan SDN Karanganyar dilaksanakan melalui dua bentuk utama. Pertama, pendampingan siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler yang dilakukan melalui kolaborasi antara guru kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Pendampingan ini berlangsung selama proses pembelajaran di kelas, di mana GPK memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami hambatan akademik, sosial, maupun perilaku. Bentuk dukungan meliputi modifikasi materi pembelajaran, adaptasi strategi dan metode mengajar, pemberian instruksi tambahan, serta penguatan terhadap keaktifan siswa. Selain mendampingi siswa, GPK juga berperan membantu guru kelas melalui pencatatan perkembangan siswa dan berbagi pengalaman

agar layanan pendidikan tetap berkelanjutan. Pendampingan ini sejalan dengan pendapat (Kustawan, 2012) yang menegaskan bahwa GPK memiliki peran penting dalam pendampingan akademik, asesmen berkelanjutan, serta koordinasi dengan guru kelas. Model ini juga sesuai dengan teori kolaborasi Friend dan Cook (2013) yang menekankan kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi pembelajaran inklusif.

Kedua, pendampingan melalui layanan *pull out* yang dilakukan ketika siswa berkebutuhan khusus mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran di kelas reguler. Pada kondisi tersebut, siswa dipindahkan sementara ke ruang inklusi untuk mendapatkan pendampingan individual dari GPK. Layanan *pull out* ini berupa penjelasan materi secara personal, penguatan perilaku positif, serta pengembangan keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan adanya pendampingan individual ini memungkinkan pemberian perhatian yang lebih intensif sehingga siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran dengan lebih optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan (Hallahan *et al.*, 2018) yang menyatakan bahwa layanan *pull out* efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang tidak dapat ditangani secara maksimal di kelas reguler.

Penyiapan materi pembelajaran bagi siswa di sekolah inklusi di SD Negeri Giwangan dan SD Negeri Karanganyar dilakukan dengan mengacu pada Kurikulum Merdeka serta menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pendekatan ini menekankan penyesuaian materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Dalam penyusunannya, guru kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK) berkolaborasi melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan, hambatan belajar, serta karakteristik siswa, kemudian menyusun modul ajar yang telah dimodifikasi dari segi materi, metode, dan penilaian agar lebih ramah bagi siswa berkebutuhan khusus.

Sejalan dengan pendapat (Kustawan, 2012) yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi tetap menggunakan kurikulum reguler, namun perlu dilakukan modifikasi sesuai kebutuhan individual peserta didik. Direktorat Pendidikan Luar Biasa juga menegaskan bahwa modifikasi kurikulum dapat mencakup penyesuaian alokasi waktu, isi atau materi, proses pembelajaran, sarana prasarana, lingkungan belajar, serta pengelolaan kelas. Dalam modifikasi materi, penyesuaian dilakukan pada tujuan dan isi pembelajaran, dengan prinsip bahwa tidak semua materi harus dimodifikasi, melainkan hanya materi yang benar-

benar dibutuhkan berdasarkan hasil asesmen dan tingkat kemampuan siswa.

Penerapan pembelajaran diferensiasi ini sejalan dengan pandangan (Mukelabai *et al.*, 2020) yang menekankan pentingnya penyesuaian materi, metode, dan evaluasi untuk menciptakan pembelajaran inklusif yang fleksibel dan partisipatif. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian (Putri, 2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh kurikulum yang dimodifikasi serta perencanaan pembelajaran yang disesuaikan, termasuk interaksi antara guru dan siswa serta hubungan sosial antar peserta didik. Selain itu, penelitian (Narti, 2023) mengungkapkan bahwa sekolah inklusi menerapkan kurikulum K13 yang dimodifikasi dan model pembelajaran *Two Teachers*, sementara penelitian (Nurjannah *et al.*, 2023) menegaskan bahwa adaptasi kurikulum mencakup modifikasi tujuan, isi, dan evaluasi pembelajaran agar lebih responsif terhadap keragaman peserta didik.

Kesiapan guru pendidikan inklusi di SD Negeri Giwangan dan SD Negeri Karanganyar tercermin dari ketersediaan guru kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK) dengan latar belakang pendidikan yang relevan. SD Negeri Giwangan memiliki 12 guru kelas dan 4 GPK yang berasal dari bidang Pendidikan Luar Biasa, Bimbingan Konseling, dan Psikologi. Sementara itu, SD Negeri Karanganyar memiliki 6 guru kelas dan 4 GPK dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa dan Bimbingan Konseling. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua sekolah telah dipersiapkan secara struktural untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru kelas dan GPK menjalin kolaborasi yang erat di dalam kelas dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif tanpa membedakan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus (ABK). Kolaborasi tersebut meliputi pembagian peran dalam pembelajaran, pertukaran informasi mengenai kebutuhan siswa, serta penyusunan modul ajar yang disesuaikan dari aspek tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran berdasarkan kemampuan dan karakteristik siswa ABK. Selain itu, GPK secara aktif mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai upaya peningkatan kompetensi profesional. Guru juga menunjukkan kesiapan emosional dalam menghadapi keberagaman karakter dan kondisi siswa di kelas. Temuan ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No .M.699/B.B1/GT.01.02/2024 yang menegaskan pentingnya ketersediaan dan penugasan guru pendidikan khusus melalui ULD.

Kolaborasi guru kelas dan GPK juga sesuai dengan pandangan (Friend & Cook, 2013) yang menekankan bahwa kolaborasi merupakan kerja sama setara untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, kesiapan guru dalam menyesuaikan pembelajaran dan bersikap empatik menguatkan pandangan (Kustawan, 2012) bahwa sikap, pengetahuan, dan keterampilan guru menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Ariani, 2022) serta (warastuti *et al.*, 2024), yang menyatakan bahwa kesiapan guru dipengaruhi oleh pelatihan, pengalaman, dukungan kelembagaan, serta penerimaan terhadap keberagaman siswa. Dukungan manajemen sekolah, sebagaimana dikemukakan Manalo, (2024) turut memperkuat kepercayaan diri guru dalam mengelola kelas yang heterogen melalui penyediaan GPK, kebijakan inklusif, dan fasilitas pendukung. Dengan demikian, kesiapan guru di kedua sekolah merupakan hasil sinergi antara kompetensi profesional, kesiapan emosional, kolaborasi, serta dukungan kebijakan dan manajemen sekolah.

Komite berupaya untuk melaksanakan agenda pertemuan secara berkala dengan orang tua dan anggota masyarakat dengan agenda pertemuan untuk penyusunan program pelajaran dan pendidikan yang akan dilaksanakan tiap semester. Pada peran ini komite menerima masukan baik langsung ataupun tidak langsung untuk selanjutnya berkoordinasi dengan sesama pengurus guna mendapatkan gambaran solusi sebelum di lanjut dengan koordinasi dengan pihak sekolah. Peran komite dalam memberikan pertimbangan terkait rencana anggaran pendapatan belanja sekolah, hal ini dilakukan dengan sekolah memaparkan menyampaikan sumber anggaran yang diperoleh dan komite memiliki hak untuk menyampaikan saran dan masukan untuk perencanaan anggaran. Peran komite dalam memberikan pertimbangan serta masukan dalam penetapan kinerja sekolah serta pengembangan sumber daya, dalam pengembangan sumber daya komite sekolah dapat mensosialisasikan usulan kebijakan dan program pendidikan kepada masyarakat, selain itu komite sekolah dapat memberikan pertimbangan tentang kondisi tenaga kependidikan di sekolah. Penyampiannya dapat melalui forum rapat dengan guru beserta staf atau bisa juga dilakukan audiensi dengan kepala sekolah serta selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, komite dapat melakukan pemantauan terhadap kondisi tenaga kependidikan di sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri Giwangan dan SD Negeri Karanganyar telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif.

Fasilitas yang tersedia meliputi ruang kelas dan ruang khusus, toilet duduk, kursi roda, media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus (ABK), serta fasilitas aksesibilitas seperti ramp dan guiding block di SD Negeri Giwangan. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan upaya sekolah dalam memenuhi kebutuhan dasar ABK sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang ramah terhadap keberagaman peserta didik.

Temuan ini sejalan dengan kebijakan pendidikan inklusi yang diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan diperkuat melalui pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2022 yang menegaskan bahwa sarana dan prasarana sekolah inklusi pada dasarnya sama dengan sekolah reguler, namun harus dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas untuk menjamin keamanan dan kemudahan mobilitas ABK. Keberadaan fasilitas seperti ramp, toilet duduk, dan kursi roda di kedua sekolah menunjukkan implementasi prinsip aksesibilitas tersebut. Selain itu, kondisi ini juga mendukung pandangan Dapa & Tuoreh (2021) yang menekankan pentingnya penyesuaian sarana prasarana berdasarkan kebutuhan spesifik setiap anak, termasuk penyediaan ruang khusus dan media pembelajaran adaptif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Suvita *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar kondusif di sekolah inklusi, terutama jika didukung oleh pengelolaan yang berkelanjutan. Pada konteks penelitian ini, penganggaran sarana dan prasarana yang dilakukan secara rutin setiap tahun mencerminkan adanya manajemen fasilitas yang terencana. Temuan ini juga memperkuat pandangan (Karmelia *et al.*, 2024) serta (Santi *et al.*, 2025) yang menekankan bahwa sarana prasarana inklusif, jika dikelola secara partisipatif, dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh peserta didik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di kedua sekolah dasar tersebut relatif memadai dan selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Kombinasi antara fasilitas aksesibilitas, media pembelajaran adaptif, serta penganggaran yang berkelanjutan mencerminkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung keberhasilan belajar seluruh siswa

Hasil penelitian di SD Negeri Giwangan dan SD Negeri Karanganyar menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan berbagai

pihak, terutama lembaga eksternal, guru pendamping khusus (GPK), kepala sekolah, serta kemitraan antara sekolah, orang tua, dan institusi lain. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rika Syaf Putri (2023) yang menegaskan bahwa keberadaan regulasi pemerintah mengenai pendidikan inklusif serta ketersediaan GPK menjadi faktor kunci pendukung terlaksananya pembelajaran inklusif. Sama halnya dengan kondisi dua sekolah penelitian ini, keberadaan GPK yang cukup, kerja sama dengan UPT Layanan Disabilitas, serta dukungan kepala sekolah terbukti memberikan kontribusi signifikan bagi kelancaran proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus (ABK). Lebih lanjut, teori yang dikemukakan oleh Aldjon Nixon Dapa dan Roos Marie Stella Tuerah (2021) juga memperkuat temuan penelitian ini. Mereka menegaskan bahwa manajemen sekolah inklusif yang efektif ditandai oleh pelibatan seluruh komponen pendidikan dalam setiap tahapan manajerial, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SD Negeri Giwangan dan SD Negeri Karanganyar telah menerapkan prinsip tersebut melalui keterlibatan kepala sekolah, guru kelas, GPK, orang tua, serta lembaga masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran inklusif. Selain itu, adanya kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan—baik melalui UNY, UPT Layanan Disabilitas, maupun lembaga lain—mencerminkan penerapan prinsip manajemen inklusif yang memfasilitasi peningkatan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan siswa. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Robiatul Munajah (2021), yang menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, guru, dan dinas pendidikan sebagai faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Hasil penelitian di dua sekolah menunjukkan bahwa pola kolaborasi tersebut telah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya kemitraan yang melibatkan berbagai pihak seperti UPT Layanan Disabilitas, rumah sakit untuk asesmen, dan ISI dalam pengembangan bakat siswa. Hal ini memperkuat pernyataan Robiatul bahwa implementasi pendidikan inklusif menuntut kerja sama lintas sektor agar layanan pendidikan dapat diberikan secara tepat dan menyeluruh kepada semua peserta didik. Selain itu, penelitian Didi Kriswanto (2023) yang mengkaji penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Giwangan Yogyakarta menunjukkan kesesuaian kuat dengan hasil penelitian ini. Didi menemukan bahwa dukungan orang tua, kepemimpinan kepala sekolah, lingkungan sekolah yang ramah anak, ketersediaan sarana prasarana, serta keberadaan GPK merupakan faktor dominan keberhasilan pendidikan inklusif. Kondisi tersebut identik

dengan temuan di SD Negeri Giwangan dan SD Negeri Karanganyar. Bahkan, faktor penghambat yang diidentifikasi Didi—seperti rendahnya kompetensi guru dalam mendampingi ABK serta beragamnya kebutuhan siswa—juga ditemukan dalam penelitian ini, meskipun telah diminimalkan melalui berbagai pelatihan yang diikuti oleh guru dan GPK. Didi juga mengusulkan beberapa solusi seperti peningkatan pelatihan guru, kolaborasi antara guru kelas dan GPK, serta evaluasi dan asesmen berkala. Solusi tersebut secara langsung sejalan dengan praktik yang telah dilakukan kedua sekolah, misalnya melalui kerja sama dengan UNY, UPT Disabilitas, dan rumah sakit, serta pelaksanaan asesmen yang rutin. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mendukung temuan Didi, tetapi juga menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan sebagian besar rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas layanan inklusif. Secara keseluruhan, hubungan antara temuan penelitian ini dengan teori dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya konsistensi dalam faktor-faktor pendukung pendidikan inklusif, yaitu: dukungan kelembagaan dan regulasi, ketersediaan GPK dan kolaborasi antar guru, pelibatan orang tua dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, serta peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif di kedua sekolah dipengaruhi oleh keberlangsungan kerja sama multipihak dan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan inklusif sebagaimana dikemukakan dalam teori dan penelitian sebelumnya.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan dari penelitian ini yakni pendampingan siswa pada pendidikan inklusi di kota Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan siswa ABK melalui dua bentuk layanan, yaitu pembelajaran bersama di kelas reguler bersama dengan guru kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK), serta layanan *pull out* di ruang inklusi. Pelaksanaan ini berjalan secara konsisten dan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kebutuhan pembelajaran setiap siswa terpenuhi sesuai karakteristiknya. Penyiapan materi belajar pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta Guru kelas dan GPK pada kedua sekolah telah bekerja sama dalam menyusun modul ajar melalui prinsip diferensiasi pada Kurikulum Merdeka. Penyesuaian mencakup tujuan pembelajaran, materi, media, serta evaluasi, sehingga pembelajaran yang diberikan kepada ABK lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan individual siswa.

Kesiapan guru pada pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta terlihat pada kerja sama antara guru kelas dan GPK dalam memodifikasi modul ajar, keterlibatan dalam pelatihan yang diselenggarakan UPT Layanan Disabilitas, serta kesiapan emosional dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan afektif guru telah berkembang sesuai tuntutan layanan inklusif.

Ketersediaan sarana dan prasarana pada pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta telah memadai untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusi, seperti keberadaan ruang inklusi, toilet aksesibel, serta berbagai media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan ABK. Fasilitas tersebut mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, ramah, dan dapat diakses oleh seluruh siswa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusi kota Yogyakarta antara lain dukungan UPT Layanan Disabilitas dalam asesmen, SPMB jalur afirmasi, serta penyediaan GPK; kolaborasi seluruh warga sekolah termasuk kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa; kerja sama dengan institusi eksternal seperti UNY, ISI, RS Pratama, UII, dan puskesmas; serta kecukupan sarana dan prasarana yang tersedia. Kolaborasi lintas lembaga dan keterlibatan aktif orang tua menjadi elemen penting dalam memperkuat layanan inklusif.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan bagi sekolah yakni penelitian ini dapat menjadi referensi pembaharuan terkait manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan pelayanan terhadap ABK. Bagi kepala sekolah diharapkan terus berkolaborasi dengan semua warga sekolah yakni guru kelas, guru pendamping khusus, karyawan dan orang tua menyamakan persepsi mengenai pendidikan inklusi bersama dengan ULD dalam menyediakan GPK di sekolah, berdiskusi dan berbagi pengetahuan, sekaligus mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja guru melalui fasilitas pembelajaran yang

memadai. Pelatihan berkelanjutan bagi guru terutama yang berkaitan pendidikan inklusif.

Daftar Pustaka

- Ariani, A. (2022). Adaptasi kurikulum di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. *Pahlawan*, 18(1), 89–94.
https://www.neliti.com/id/publications/554609/_adaptasi-kurikulum-di-sekolah-penyelenggara-pendidikan-inklusif#cite
- Bahri, S. (2021). Manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar. *EDUKATIF : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 94–100.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1754>
- Dapa, A. N., & Tuerah, R. M. (2021). *Manajemen sekolah inklusif*. Bumi Aksara.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2022). *Pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Friend, M., & Cook, L. (2013). *Interactions: Collaboration skills for school professionals* (7th ed.). Pearson Education..
- Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2018). *Exceptional learners: An introduction to special education* (13th ed.). Pearson Education. ISBN-13: 978-0134806938
- Karmelia, N., Khoiriyah, L., Anggraini, R., & Marhadi, M. (2024). Pengembangan sarana dan prasarana ramah inklusi dalam mendukung pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 20(1), 33–45
<https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i2.810>
- Kriswanto, D., Suyatno, & Sukirman. (2023). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Analisis Faktor-Faktor dan Solusi yang Ditawarkan. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3081–3090.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6167>
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan inklusif dan upaya implementasinya*. Luxima Metro Media. ISBN 978-602-7635-18-
- Manalo, E. (2024). School leadership support and teachers' readiness for inclusive education. *Journal of Inclusive Education Practices*, 9(1), 41–55.
<https://doi.org/10.54476/ioer-imrj/295196>
- Mukelabai, M. G., Siakalima, D., Simalalo, M., Muleya, G., Kaputa, T. M., & Simui, F. (2020). International perspectives on preparing pre-service teachers for inclusive education pedagogies: Implications for developing countries. *American Journal of Educational Research*, 8(12), 885–892.
<https://doi.org/10.12691/education-8-12-1>

- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). *Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar*. Jurnal Basicedu, 5(3). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.886>
- Muttaqien, M. D. (2023). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Pendidikan Anak Usia Dini. 2(2), 75–85. <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jdsr/article/view/2078>
- Narti, T. (2023). *Manajemen program pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/30390/>
- Nurwan, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal Of Education On Social Science)*, 3(2), 201-212. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/176>
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor M.699/B.B1/GT.01.02/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penugasan Guru Pendidikan Khusus pada Unit Layanan Disabilitas.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa.
- Putri, R. S. (2023). *Manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri 131 Kota Jambi* (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/43782/6/RIKA%20SYAF%20PUTRI%20TESIS%20UJUH.pdf>
- Santi, A., Komariah, L., Mulawarman, W. G., Nurlaili, Akhmad, & Azainil. (2025). *Strategies for managing facilities and infrastructure in inclusive schools*. Research Horizon, 5(3), 933–944. <https://doi.org/10.54518/rh.5.3.2025.573..>
- Suvita, Y., Manullang, T. I. B. ., Sunardi, S., & Supriatna, . M. . (2022). Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(2), 155–164. <https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i2.601>
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen keempat)*. Pasal 31 ayat (1–2)
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 108.
- Warastuti, W., Kurniyanti, W., Hastuti, Y. N., C. W., & Minsih. (2024). *Analisis kesiapan guru kelas sekolah dasar dalam mengelola pendidikan inklusi*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(3), 748–761. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/16550>
- UNESCO. (1994). *The Salamanca statement and framework for action on special needs education*. UNESCO.
- UNESCO. (2017). *A guide for ensuring inclusion and equity in education*. UNESCO Publishing.